

IMPLEMENTASI PROGRAM KREDIT USAHA RAKYAT DI BANK RAKYAT INDONESIA UNIT SUKAMERINDU KOTA BENGKULU

Oleh:

Elsa Trifena s. Simanjuntak, Sugeng Suharto, Abdul Aziz Zulhakim
Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Bengkulu

ABSTRAK

Peran perbankan dalam pembangunan ekonomi adalah mengalirkan dana bagi kegiatan ekonomi yaitu salah satunya dalam bentuk perkreditan bagi masyarakat perseorangan atau badan usaha yang berada di daerah sekitar seperti di daerah Sukamerindu. Bank Rakyat Indonesia adalah Bank pelaksana yang menyalurkan Kredit Usaha Rakyat Terbanyak. Hal ini dikarenakan Bank Rakyat Indonesia memiliki cabang yang luas di bandingkan dengan Bank pelaksana yang lainnya sehingga mudah dalam penyaluran kredit. Sehingga dilakukannya penelitian ini yang bertujuan untuk mengetahui Implementasi Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Rakyat Indonesia Unit Sukamerindu Kota Bengkulu. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam teknik analisis data menggunakan tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan penelitian ditemukan hasil bahwa Implementasi Program Kredit Usaha Rakyat di Bank Rakyat Indonesia unit Sukamerindu Kota Bengkulu tahapan pelaksanaan program KUR di BRI unit Sukamerindu menunjukkan kesesuaian yang baik dengan tujuan program KUR. Penyampaian informasi pada tahap pengajuan pinjaman memastikan bahwa nasabah memahami secara jelas persyaratan, manfaat, dan risiko terkait dengan program KUR, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang tepat. Selain itu, BRI unit Sukamerindu tidak hanya menyediakan alokasi dana yang memadai, tetapi juga fasilitas yang lengkap seperti gedung yang representatif dan infrastruktur yang mendukung efisiensi layanan kepada nasabah.

Kata Kunci: Bank Rakyat Indonesia, Kredit Usaha Rakyat, Implementasi Program.

The role of banking in economic development is to channel funds for economic activities, including credit provision to individuals or businesses in local areas such as Sukamerindu. Bank Rakyat Indonesia (BRI) is the leading executor of the People's Business Credit (KUR) program. This is due to BRI's extensive branch network compared to other executing banks, facilitating easy credit distribution. Hence, this research aims to explore the Implementation of the People's Business Credit Program (KUR) at Bank Rakyat Indonesia, Sukamerindu Unit, Bengkulu City. This qualitative descriptive study employed data collection techniques such as observation, interviews, and documentation. Data analysis involved stages of data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. Based on the findings, it was determined that the implementation of the People's Business Credit Program at BRI, Sukamerindu Unit, aligns well with the objectives of the KUR program. Information dissemination during the loan application phase ensures that customers have a clear understanding of the requirements, benefits, and risks associated with the KUR program, enabling them to make informed decisions. Furthermore, BRI, Sukamerindu Unit, not only provides adequate fund allocations but also comprehensive facilities such as a representative building and infrastructure that support efficient customer service.

Keywords: Bank Rakyat Indonesia, People's Business Credit, Program Implementation

ABSTRACT

A. PENDAHULUAN

Peran perbankan dalam pembangunan ekonomi adalah mengalirkan dana bagi kegiatan ekonomi yaitu salah satunya dalam bentuk perkreditan bagi masyarakat perseorangan atau badan usaha yang berada di daerah sekitar (Peronica, 2020). Dalam hal kegiatan bank memberikan fasilitas kredit, resiko kerugian sebagian besar bersumber pada kegiatan tersebut, sehingga bila tidak dikelola dengan baik dan disertai pengawasan yang memadai akan mengancam kelangsungan hidup bank tersebut. Pada tanggal 5 November 2007 Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) lahir sebagai respon dari Instruksi Presiden (Inpres) No. 6 Tahun 2007, Tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Reformasi Sektor Keuangan, (Hukum & Binbangkum, 2007). Inpres tersebut ditindak lanjuti dengan ditanda tangannya Nota Kesepahaman Bersama (Memorandum of Understanding/ MoU) antara Pemerintah, Perusahaan Penjamin, dan Perbankan sebagaimana kemudian diubah beberapa dengan addendum ke IV pada tanggal 10 Januari 2012 Penjaminan Kredit/Pembiayaan kepada UMKM dan Koperasi atau yang lebih populer dengan istilah Program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Melalui program KUR, pemerintah mengharapkan adanya percepatan pengembangan kegiatan perekonomian terutama di sektor riil, dalam rangka penanggulangan atau pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja.

Pemerintah Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko) Nomor 135 Tahun tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Permenko ini merupakan pengganti peraturan sebelumnya yang berlaku secara efektif mulai januari 2023. Adapun perubahan kebijakan KUR yang diatur dalam peraturan tersebut adalah tingkat suku bunga KUR di mana peminjam KUR yang baru pertama kali akan dikenakan bunga sebesar 6% efektif per tahun untuk pinjaman diatas Rp 10 juta (KUR Mikro dan KUR Kecil), sementara suku bunga bagi nasabah yang pernah meminjam lebih dari satu kali akan lebih tinggi sampai mencapai 9%, kelompok usaha sebagai calon penerima KUR, skema KUR khusus, skema KUR multisektor, pengaturan minimum porsi dan grace periode, perubahan istilah KUR Ritel menjadi KUR Kecil, plafon KUR mikro sektor produksi dan diluar sektor produksi, penyaluran KUR bersama dengan kredit lain yang diperbolehkan, struktur biaya KUR penempatan TKI, KUR untuk masyarakat daerah perbatasan, KUR untuk optimalisasi Kelompok Usaha Bersama (KUBE)

Peranan perusahaan penjamin dalam KUR adalah memberikan sebagian penjaminan terhadap Bank pelaksana atas KUR yang diberikan kepada UMKMK. Meski begitu, debitur UMKMK tetap wajib melunasi KUR yang diterima dari Bank pelaksana. Adapun pihak yang membayar Imbal Jasa Penjamin (IJP). Di antara beberapa Bank pelaksana yang menyalurkan KUR, Bank Rakyat Indonesia (BRI) adalah Bank pelaksana yang menyalurkan KUR terbanyak. Hal ini

di karenakan BRI memiliki jaringan yang luas dibandingkan dengan Bank pelaksana lainnya sehingga memudahkan dalam penyaluran kredit.

Salah satu bentuk pelayanan Bank Rakyat Indonesia (BRI) terhadap masyarakat adalah penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Baik melalui kantor Cabang, cabang pembantu maupun unit setiap daerah. Salah satunya Bank Rakyat Indonesia (BRI) unit Sukamerindu, Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu. Bank Rakyat Indonesia (BRI) unit sukamerindu telah menyalurkan banyak Kredit Usaha Rakyat, Dengan harapan mampu mengembangkan kapasitas usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) lebih optimal. Menurut studi pendahuluan (prasurvei) nampaknya masih terdapat beberapa kelemahan atau permasalahan dalam implementasi program KUR dengan Bank pelaksana. Adapun data yang diperoleh peneliti pada saat prasurvei di Bank Rakyat Indonesia Unut Sukamerindu Kota Bengkulu dapat dilihat pada diagram dibawah ini.

Grafik 1.1
Data Penerimaan KUR tahun 2020-2023 pada Bank Rakyat Indonesia
Unit Sukamerindu, Kota Bengkulu



Sumber: Laporan pinjaman perbidang usaha, BRI unit Sukamerindu

Terdapat lima jenis sektor Ekonomi yang mendapatkan program KUR, sepanjang tahun 2020-2023, penyaluran KUR terbesar masih terpusat pada sektor usaha perdagangan dimana penyaluran KUR yang mencapai 72%. Di sisi lain, sektor ekonomi lain seperti pertanian dengan total penyaluran KUR 2%, jasa kemasyarakatan 18%, industri pengolahan 5% dan perikanan 3% Rendahnya penyaluran KUR pada beberapa sektor tertentu disebabkan oleh tingginya faktor risiko. Bank cenderung enggan memberikan pinjaman bagi pengusaha yang memiliki karakteristik penghasilan tidak tetap seperti nelayan dan petani. Akibatnya, nelayan dan petani menghadapi kesulitan mendapat akses terhadap modal usaha. Bank penyalur KUR memilih menyalurkan dana besar kepada satu pengusaha yang dianggap *bankable* ketimbang menyalurkan pinjaman kepada

ribuan pelaku UMKM yang dianggap tidak *bankable*.

Padahal, mandat KUR sejatinya menysasar masyarakat yang belum bankable terutama untuk sektor usaha mikro, kecil, dan menengah. Persyaratan administrasi memperoleh KUR yang ditetapkan oleh pemerintah masih dianggap sulit dan berat untuk dapat dipenuhi oleh para pelaku usaha mikro calon debitur, terutama syarat ijin usaha mikro dari pemerintah daerah, dan persyaratan tambahan lainnya dari pihak Bank Pelaksana. Di lain pihak menurut pengakuan pihak Bank Pelaksana, pemohon KUR Mikro sebenarnya cukup banyak, namun tidak semua dapat dikabulkan/dipenuhi karena tidak memenuhi persyaratan sebagai penerima KUR Mikro sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 6 Tahun 2015, ataupun persyaratan administrasi tertentu yang ditetapkan oleh Bank Pelaksana yaitu Bank Rakyat Indonesia (BRI)

Saat prasurvei peneliti juga mewawancarai beberapa nasabah yang telah menerima KUR. Dari beberapa nasabah tersebut ada yang mengetahui adanya program KUR bukan dari pemerintah atau pihak bank melainkan keluarga dan teman nasabah tersebut. Sehingga Banyak pelaku usaha mikro tidak mengetahui adanya KUR Mikro dan kurang paham bagaimana mengurus/mempeiroleh KUR Mikro, karena kurangnya sosialisasi dan komunikasi dari unsur-unsur pelaksana kebijakan terutama dari instansi Bank Pelaksana.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa ada beberapa permasalahan yang terjadi pada Implementasi program KUR pada bank terkait di antaranya ialah :

1. Rendahnya penyaluran KUR pada sektor Pertanian dan perikanan
2. Banyak pelaku usaha mikro tidak mengetahui adanya KUR dan kurang paham bagaimana mengurus/mempeiroleh KUR, karena kurangnya sosialisasi dan komunikasi dari unsur-unsur pelaksana kebijakan terutama pihak Bank Pelaksana.
3. Persyaratan administrasi mempeiroleh KUR yang ditetapkan oleh pemerintah masih dianggap sulit dan berat untuk dapat dipenuhi oleh para pelaku usaha mikro calon debitur, terutama persyaratan tambahan lain dari pihak Bank Pelaksana
4. Realisasi besar kredit yang disetujui pihak Bank seringkali tidak sesuai dengan besar kredit yang dibutuhkan calon debitur, sehingga ada calon debitur yang kecewa dengan pihak bank

Melalui pemaparan latar belakang masalah penelitian yang telah peneliti kemukakan diatas dapat dijadikan dasar awal peneliti untuk menganalisis lebih mendalam akan Implementasi kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) maka judul penelitian ini adalah **“Implementasi Program Kredit Usaha Rakyat di Bank Rakyat Indonesia unit Sukamerindu, Kota Bengkulu”**

B. LANDASAN TEORI

Kemudian menurut Riant Nugroho terdapat 4 tahapan Implementasi Kebijakan (Riant, 2017) yaitu sebagai berikut :

1. Sosialisasi kebijakan

Sosialisasi merupakan proses yang dilakukan setelah suatu kebijakan dibuat dan sebelum kebijakan memasuki tahap implementasi atau pelaksanaan. Sosialisasi kebijakan publik diartikan sebagai upaya penyebaran isi atau substansi suatu kebijakan (Herdianto, 2018) yang telah dibuat dengan maksud untuk memunculkan pengetahuan dan pemahaman dari berbagai pihak yang terkait, termasuk didalamnya kelompok sasaran (target group) agar mau dan mampu menjalankan perannya dalam menyukseskan tujuan sebagaimana tercantum dalam kebijakan tersebut (Dian Herdiana, 2018, h. 2018). Menurut Nugroho pola sosialisasi terdiri dari :

- a. Pejabat negara cara menandatangani naskah kebijakan publik melalui seremoni yang diliputi oleh media massa dan disiarkan langsung kepada publik.
- b. Pertemuan pers dan atau publikasi melalui media massa.
- c. Semu publik
- d. Seminar, sarasehan, konferensi, dan talk show
- e. Sarana pengingat lain, seperti brosur, stiker dan lainnya.

2. Pelaksanaan atau implementasi

Implementasi berarti pelaksanaan dari kebijakan publik, dimana pelaksanaan ini prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Pelaksanaan kebijakan merupakan pihak-pihak yang menjalankan kebijakan yang terdiri dari penentuan tujuan dan sasaran organisasional. Proses implementasi terencana baik dengan adanya faktor-faktor yang mempengaruhi, Rondinelli dan Cheema mengidentifikasi empat faktor yang mempengaruhi implementasi (Purwanto, 2015) yaitu :

- a. Kondisi lingkungan
- b. Hubungan antar organisasi
- c. Sumber daya

3. Pengawasan

Pengawasan adalah usaha secara terus menerus untuk memahami perkembangan bidang-bidang tertentu tugas atau proyek yang sedang dilaksanakan. Adapun dari pelaksanaan tujuan

pengawasan menurut Nugroho yaitu :

- a. Untuk menghindari terjadinya penyimpangan/kesalahan/ keterlambatan sehingga dapat diluruskan
 - b. Memastikan proses implementasi sesuai dengan model implementasi yang sesuai
 - c. Memastikan bahwa implementasi kebijakan menuju arah kinerja kebijakan yang dikehendaki
4. Evaluasi

Evaluasi biasanya ditujukan untuk menilai sejauh mana keefektifan kebijakan publik dipertanggungjawabkan kepada konstituennya. Evaluasi dilakukan untuk melihat kesenjangan antara “harapan” dan “kenyataan”, tujuan pokok evaluasi bukanlah untuk menyalah-nyalahkan, melainkan untuk melihat seberapa besar kesenjangan antara pencapaian dan harapan suatu kebijakan publik, tugas selanjutnya adalah bagaimana mengurangi atau menutup kesenjangan tersebut. Jadi evaluasi kebijakan publik harus dipahami sebagai suatu yang bersifat positif, evaluasi bertujuan untuk mencari kekurangan dan menutup kekurangan. Menurut Dunn N. William, istilah evaluasi mempunyai arti yaitu secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (appraisal), pemberian angka (rating) dan penilaian (assessment), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya (William N. Dunn, 2003, h. 608-61). Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Dalam buku Konsep Administrasi dan Administrasi di Indonesia berpendapat bahwa evaluasi merupakan proses perbandingan antara standar dengan fakta dan analisa hasilnya. Kesimpulannya adalah perbandingan antara tujuan yang hendak dicapai dalam penyelesaian masalah dengan kejadian yang sebenarnya, sehingga dapat dengan analisa akhir apakah suatu kebijakan harus direvisi atau dilanjutkan.

C. METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Lokasi penelitian ini bertempat di Kantor Bank Rakyat Indonesia Unit Sukamerindu, kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu. Teknik yang diterapkan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan fokus penelitian di atas maka dengan menggunakan teori implementasi kebijakan publik menurut Riant Nugroho (2017, h. 52) yang dimana salah satu aspeknya yaitu pelaksanaan yang akan dikaitkan dengan tujuan dari program KUR. Dimana tujuan dari program KUR yaitu :

- 1) Meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan kepada usaha produktif

- 2) Meningkatkan kapasitas daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah
- 3) Mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja

Dalam penelitian ini, pemilihan informan dilakukan dengan menggunakan metode purposive sampling, dimana informan terdiri dari Asep Wijaya, yang menjabat sebagai Kepala Unit Bank BRI Unit Sukamerindu, dan Jubles Asotakwan Sianturi sebagai supervisor di unit tersebut. Mereka bertanggung jawab memastikan kelancaran operasional serta kualitas layanan perbankan yang diberikan kepada nasabah. Wahyu Aripin dan Mashita Anggraini, sebagai mantri KUR, turut aktif dalam memberikan pendampingan kepada nasabah seperti Muharni, Dian, dan Frando, yang menggunakan pinjaman KUR untuk kegiatan ekonomi mereka. Sementara itu, nasabah KUPRA seperti Sukar dan Alber sebagai informan tambahan yang dirasa penulis memiliki informasi yang pas dalam penelitian ini.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peneliti akan mengidentifikasi mengenai implementasi program KUR di BRI unit Sukamerindu kota Bengkulu sesuai dengan tujuan dari program KUR yang ditetapkan dari hasil temuan yang didapatkan saat dilapangan, yang akan dijelaskan berdasarkan aspek penelitian yang telah dilakukan, sebagai berikut:

1. Tahapan Pelaksanaan

a. Penyuluhan dan informasi

Bank Rakyat Indonesia (BRI) unit Sukamerindu merupakan salah satu bank di Bengkulu yang menawarkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk membantu para pelaku usaha kecil dan menengah. Saat nasabah tertarik untuk mengajukan pinjaman KUR, mereka dapat langsung menghubungi unit BRI Sukamerindu untuk memperoleh informasi yang mereka butuhkan. BRI unit Sukamerindu memberikan informasi tentang KUR pada saat nasabah yang ingin mengajukan pinjaman karena beberapa alasan yang mendasar. Dimana BRI unit Sukamerindu mengutamakan efisiensi dan kenyamanan bagi para nasabah. Dengan memberikan informasi tentang KUR saat proses pengajuan pinjaman, BRI unit Sukamerindu memastikan bahwa nasabah mendapatkan semua informasi yang mereka butuhkan dalam satu kesempatan, mengurangi kebingungan dan mempercepat proses pengambilan keputusan. Cara ini memungkinkan BRI Unit Sukamerindu untuk memberikan informasi yang lebih terperinci dan relevan. Saat nasabah tertarik untuk mengajukan pinjaman, mereka cenderung lebih fokus dan terbuka terhadap informasi yang diberikan, sehingga Mantri BRI Unit Sukamerindu dapat menyampaikan penjelasan yang lebih mendalam tentang persyaratan, manfaat, dan risiko yang terkait dengan program KUR, dengan memberikan informasi tentang KUR pada saat pengajuan pinjaman, Pihak BRI unit Sukamerindu

untuk memberikan saran yang lebih spesifik dan solusi yang lebih sesuai dengan situasi dan kebutuhan individu nasabah, sehingga mereka dapat memanfaatkan program KUR secara optimal sesuai dengan kebutuhan mereka. Dengan cara ini, para mantri BRI Unit Sukamerindu dapat memastikan bahwa nasabah mendapatkan layanan yang paling sesuai dengan kebutuhan dan keinginan mereka.

Meskipun informasi tentang program KUR seringkali hanya diberikan saat proses pengajuan pinjaman, para nasabah BRI unit Sukamerindu umumnya memahami hal ini dan tidak mengeluh. Terbukti dengan temuan yang di temukan peneliti, terkait data nasah pinjaman KUR yang dimana rata-rata nasabahnya mengembalikan pinjaman tepat waktu dan dimana peneliti juga menemukan penemuan bahwasannya nasabah yang mendapatkan pinjaman KUR, merupakan masyarakat yang memiliki usaha UMKM dan mereka mengembangkan usahanya dengan baik. Selain itu, BRI unit Sukamerindu juga menyediakan berbagai saluran komunikasi, seperti website resmi, layanan call center, dan media sosial, yang dapat diakses oleh nasabah untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang program KUR. Meskipun nasabah mungkin hanya terpapar informasi ini saat mereka benar-benar tertarik untuk mengajukan pinjaman, namun kemudahan akses ini memungkinkan mereka untuk memperoleh pengetahuan lebih mendalam tentang persyaratan, prosedur, dan manfaat yang ditawarkan oleh program KUR.

Sehingga penyuluhan dan pemberian informasi pada BRI unit Sukamerindu terhadap nasabah yang mengajukan pinjaman KUR sudah berjalan sesuai dengan tujuan KUR. Dimana salah satu tujuan utama dari program KUR adalah memberikan akses pembiayaan yang lebih mudah dan terjangkau bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Namun, untuk mencapai tujuan tersebut, penting untuk memastikan bahwa para calon penerima KUR memiliki pemahaman yang cukup tentang program tersebut. Penyuluhan dan informasi bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman mereka tentang manfaat, persyaratan, prosedur, dan tanggung jawab yang terkait dengan program KUR. Dengan menyelenggarakan penyuluhan dan informasi yang efektif, BRI Sukamerindu dapat memastikan bahwa UMKM memiliki pengetahuan yang cukup untuk memanfaatkan program KUR dengan baik. Hal ini membantu memastikan bahwa program KUR mencapai tujuannya untuk memberikan dukungan finansial kepada UMKM yang membutuhkan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal maupun nasional. Oleh karena itu, penyuluhan dan informasi memainkan peran penting dalam mencapai tujuan keseluruhan dari program KUR.

b. Pendaftaran dan pengajuan pinjaman

KUR di BRI didesain sedemikian rupa agar sesuai dengan tujuan dari program KUR. Tujuan utama dari KUR adalah untuk memberikan akses kepada pelaku usaha kecil dan menengah,

terutama yang bergerak disektor rell, agar dapat memperoleh akses ke pembiayaan yang memadai untuk mendukung dan mengembangkan usaha mereka. Dalam hal pengajuan pinjaman, BRI unit Sukamerindu menyederhanakan prosesnya agar mudah diakses oleh semua kalangan. Nasabah hanya perlu mengunjungi kantor BRI unit Sukamerindu dengan membawa dokumen yang dibutuhkan, dan mantri akan membantu mereka dalam proses pendaftaran. Pendekatan ini memastikan bahwa para pelaku usaha kecil dan menengah tidak mengalami hambatan dalam mengakses program KUR. Selanjutnya, dalam proses pengajuan pinjaman, BRI memberikan kemudahan dan fleksibilitas agar sesuai dengan kebutuhan nasabah. Program KUR menawarkan berbagai pilihan produk dan fasilitas yang dapat disesuaikan dengan karakteristik usaha serta kemampuan pembayaran nasabah. Unit Sukamerindu BRI adalah salah satu unit yang berperan aktif dalam mewujudkan tujuan program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Dengan komitmen untuk memberikan akses finansial kepada para pelaku usaha kecil dan menengah di daerah, Unit Sukamerindu BRI telah merancang proses pendaftaran dan pengajuan pinjaman KUR yang sesuai dengan tujuan utama program tersebut.

Tahapan kedua dalam pelaksanaan KUR di Unit Sukamerindu BRI adalah pendaftaran. Para calon nasabah dapat mengunjungi kantor unit BRI Sukamerindu tersebut dan mendaftarkan diri dengan membawa dokumen-dokumen yang diperlukan. Setelah proses pendaftaran selesai, para nasabah yang telah terdaftar dapat melanjutkan ke tahap pengajuan pinjaman. Di Unit Sukamerindu, pengajuan pinjaman KUR juga dilakukan dengan pendekatan yang ramah dan terbuka. Mantri yang bertugas akan memberikan bimbingan kepada nasabah dalam pengajuan pinjaman. Melalui proses pendaftaran dan pengajuan pinjaman yang diselenggarakan oleh BRI Unit Sukamerindu, para pelaku usaha kecil dan menengah di daerah dapat memperoleh akses mudah dan cepat ke pembiayaan melalui program KUR. Dengan demikian, BRI Unit Sukamerindu berhasil menjalankan tahapan pelaksanaan KUR yang sesuai dengan tujuan utama program tersebut, yaitu untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan sektor usaha kecil dan menengah.

c. Verifikasi Dokumen.

Verifikasi dokumen dalam program Kredit Usaha Rakyat (KUR) di BRI unit Sukamerindu sesuai dengan tujuan dari program tersebut. Salah satu tujuan utama dari KUR adalah untuk memberikan akses pembiayaan kepada pelaku usaha kecil dan menengah yang memiliki potensi untuk mengembangkan usahanya. Dengan melakukan verifikasi dokumen, BRI dapat memastikan bahwa pembiayaan disalurkan kepada penerima yang memenuhi syarat dan mempunyai kemampuan untuk mengelola pinjaman dengan baik.

Proses verifikasi dokumen juga membantu mencegah potensi penyalahgunaan atau pembiayaan yang tidak sesuai dengan tujuan program. Dengan memastikan bahwa dokumen-dokumen yang diserahkan oleh calon nasabah adalah valid dokumen yang diperlukan telah diserahkan dengan lengkap. Mereka juga akan memberikan klarifikasi atau permintaan tambahan jika diperlukan untuk memastikan bahwa proses verifikasi berjalan lancar. Setelah semua dokumen diverifikasi dan dianggap lengkap dan valid, calon nasabah akan diberitahu tentang hasil verifikasi tersebut. Jika dokumen telah lolos verifikasi, calon nasabah dapat melanjutkan ke tahap selanjutnya dalam proses pengajuan pinjaman KUR. Namun, jika terdapat ketidaksesuaian atau kekurangan dalam dokumen, tim verifikasi akan memberikan petunjuk atau arahan kepada calon nasabah untuk memperbaiki atau melengkapi dokumen yang diperlukan. Dengan adanya proses verifikasi dokumen yang cermat dan transparan di BRI unit Sukamerindu, bank dapat memastikan bahwa semua pengajuan pinjaman KUR diproses dengan integritas dan akurasi yang tinggi. Hal ini juga membantu meminimalkan risiko dan memastikan bahwa pembiayaan disalurkan kepada pelaku usaha kecil dan menengah yang memenuhi syarat dan memiliki potensi untuk mengembangkan usahanya. Dengan demikian, verifikasi dokumen merupakan langkah yang penting dan sesuai dengan tujuan dari program KUR, yaitu untuk memberikan akses pembiayaan kepada pelaku usaha kecil dan menengah secara tepat dan efisien, serta mendukung pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal.

d. Persetujuan Pinjaman dan Pencairan Pinjaman

Pelaksanaan persetujuan pinjaman dan pencairan pinjaman di BRI unit Sukamerindu telah sesuai dengan tujuan dari program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Tujuan utama dari program KUR adalah memberikan akses pembiayaan kepada pelaku usaha kecil dan menengah dengan proses yang cepat, mudah, dan transparan. Proses persetujuan pinjaman dilakukan dengan teliti oleh mantri yang bertanggung jawab untuk mengevaluasi pengajuan pinjaman, memastikan bahwa keputusan yang diambil sesuai dengan kebijakan dan standar yang telah ditetapkan oleh bank. Ini membantu memastikan bahwa pinjaman disalurkan kepada penerima yang memenuhi syarat dan memiliki potensi untuk mengembangkan usahanya.

Selanjutnya, pencairan dana pinjaman juga dilakukan sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati antara bank dan nasabah. Nasabah diberikan informasi terperinci mengenai prosedur pencairan dana dan persyaratan yang perlu dipenuhi. Proses pencairan dana dilakukan dengan transparansi dan kejujuran, memastikan bahwa nasabah menerima dana pinjaman sesuai dengan kebutuhan mereka.

Tahapan keempat dalam pelaksanaan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) di BRI unit Sukamerindu melibatkan proses persetujuan pinjaman dan pencairan dana pinjaman kepada

nasabah yang telah lolos verifikasi. Setelah semua dokumen telah diverifikasi dan dinyatakan lengkap, langkah selanjutnya adalah persetujuan pinjaman oleh pihak bank. Di BRI unit Sukamerindu, mantri yang bertanggung jawab untuk mengevaluasi pengajuan pinjaman akan memeriksa dengan cermat semua informasi yang telah diserahkan oleh nasabah. Mereka akan meninjau proposal pinjaman, kondisi keuangan nasabah, serta risiko dan manfaat yang terkait dengan pemberian pinjaman. Proses evaluasi ini dilakukan dengan teliti dan berhati-hati untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil sesuai dengan kebijakan dan standar yang telah ditetapkan oleh bank. Setelah proses evaluasi selesai dan pinjaman disetujui, langkah selanjutnya adalah pencairan dana pinjaman kepada nasabah. BRI unit Sukamerindu akan mengatur proses pencairan dana sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati, baik mengenai jumlah pinjaman maupun jadwal pembayaran cicilan. Nasabah akan diberikan informasi terperinci mengenai prosedur pencairan dana dan persyaratan yang perlu dipenuhi. Selama proses persetujuan pinjaman dan pencairan dana, BRI unit Sukamerindu memastikan bahwa semua langkah diambil dengan transparansi dan kejujuran. Nasabah diberikan penjelasan yang jelas dan komprehensif mengenai kondisi pinjaman, termasuk tingkat bunga, jangka waktu, dan kewajiban pembayaran. Pihak bank juga memberikan bimbingan kepada nasabah mengenai pengelolaan dana pinjaman dengan bijak dan bertanggung jawab.

Dengan demikian, tahapan keempat dalam pelaksanaan program KUR di BRI unit Sukamerindu, yaitu persetujuan pinjaman dan pencairan dana pinjaman, dilakukan dengan tujuan untuk memberikan akses cepat dan mudah kepada para nasabah untuk memperoleh dana yang mereka butuhkan guna mendukung pertumbuhan dan pengembangan usaha kecil dan menengah mereka. Dengan demikian, pelaksanaan persetujuan pinjaman dan pencairan pinjaman di BRI unit Sukamerindu telah memenuhi tujuan dari program KUR, yaitu memberikan akses pembiayaan kepada pelaku usaha kecil dan menengah dengan proses yang cepat, mudah, dan transparan, sehingga mendukung pertumbuhan dan pengembangan usaha kecil dan menengah serta pertumbuhan ekonomi lokal.

e. Pendampingan dan Pemantauan

BRI unit Sukamerindu, tahapan penting dalam pelaksanaan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah pendampingan dan pemantauan setelah pencairan dana pinjaman. Setelah nasabah menerima dana pinjaman, mereka akan mendapatkan bimbingan dan dukungan dari mantri BRI unit Sukamerindu untuk memastikan bahwa dana tersebut digunakan dengan tepat dan efektif. Pendampingan dimulai dengan sesi pertemuan antara nasabah dan mantri di BRI unit Sukamerindu. Dalam pertemuan ini, nasabah diberikan penjelasan lebih lanjut mengenai penggunaan dana pinjaman, strategi pengembangan usaha, dan pembayaran cicilan pinjaman.

Mantri BRI unit Sukamerindu akan memberikan saran dan masukan yang berguna untuk membantu nasabah mengelola usahanya dengan lebih baik.

Selanjutnya, mantri unit Sukamerindu akan melakukan pemantauan secara berkala terhadap perkembangan usaha nasabah. Mereka akan melakukan kunjungan ke lokasi usaha, melakukan analisis terhadap laporan keuangan dan kinerja usaha, serta memberikan evaluasi dan rekomendasi yang diperlukan. Pendampingan dan pemantauan dilakukan secara proaktif untuk membantu nasabah mengatasi masalah yang mungkin timbul dan mengoptimalkan penggunaan dana pinjaman. Selama proses pendampingan dan pemantauan, BRI unit Sukamerindu juga memberikan dukungan tambahan kepada nasabah yang mengalami kesulitan dalam pengembangan usaha mereka. Mantri BRI unit Sukamerindu akan membantu dalam mencari solusi dan alternatif yang sesuai dengan kebutuhan dan situasi nasabah, sehingga mereka dapat terus berkembang dan berhasil dalam usaha mereka.

Dengan demikian, pendampingan dan pemantauan yang dilakukan oleh BRI unit Sukamerindu merupakan tahapan penting dalam pelaksanaan program KUR. Hal ini membantu memastikan bahwa nasabah mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan untuk mengelola usaha mereka dengan baik, sehingga dapat mencapai tujuan dan kesuksesan yang diharapkan.

f. Pengembalian Kredit

Tahapan terakhir dalam pelaksanaan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) di BRI unit Sukamerindu adalah pengembalian kredit. Setelah mendapatkan dana pinjaman dan mengembangkan usaha mereka, nasabah diwajibkan untuk membayar kembali pinjaman sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati bersama. Pengembalian kredit dilakukan melalui pembayaran cicilan bulanan atau sesuai dengan jadwal pembayaran yang telah ditetapkan. BRI unit Sukamerindu memberikan kemudahan bagi nasabah dalam melakukan pembayaran, baik melalui transfer bank, pembayaran tunai di kantor cabang, atau melalui layanan pembayaran online.

Mantri BRI unit Sukamerindu akan memantau pembayaran cicilan secara berkala untuk memastikan bahwa nasabah membayar sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Jika terdapat keterlambatan pembayaran, tim akan menghubungi nasabah untuk memberikan peringatan dan bantuan dalam menyelesaikan keterlambatan tersebut. Selama proses pengembalian kredit, BRI unit Sukamerindu juga memberikan dukungan kepada nasabah yang mengalami kesulitan keuangan. Mereka dapat mengajukan restrukturisasi pinjaman atau perpanjangan jangka waktu pembayaran jika diperlukan, sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang berlaku. Dengan demikian, pengembalian kredit merupakan tahapan penting dalam pelaksanaan program KUR di BRI unit Sukamerindu. Hal ini memastikan bahwa dana pinjaman dapat digunakan kembali untuk

membantu lebih banyak pelaku usaha kecil dan menengah, serta memastikan keberlanjutan dari program KUR secara keseluruhan.

Pengembalian kredit di BRI unit Sukamerindu sesuai dengan tujuan program KUR. Program KUR bertujuan untuk memberikan akses pembiayaan kepada pelaku usaha kecil dan menengah serta mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Pelaksanaan pengembalian kredit di BRI unit Sukamerindu mencerminkan pencapaian tujuan tersebut karena beberapa alasan,

1. Keberlanjutan Program, Melalui pengembalian kredit yang lancar, dana pinjaman yang telah disalurkan dapat digunakan kembali untuk membantu lebih banyak pelaku usaha kecil dan menengah. Hal ini mendukung keberlanjutan program KUR dan memastikan bahwa lebih banyak pelaku usaha dapat mendapatkan akses ke pembiayaan yang mereka butuhkan.
2. Pemberdayaan Ekonomi Lokal, Pengembalian kredit membantu membangun ekosistem ekonomi lokal yang kuat dengan memungkinkan sirkulasi dana di dalam komunitas. Dana yang dikembalikan dapat digunakan untuk mendukung usaha lainnya di daerah tersebut, yang pada gilirannya dapat menciptakan lapangan kerja baru dan memperkuat pertumbuhan ekonomi lokal.
3. Peningkatan Kemandirian Finansial, Proses pengembalian kredit melatih dan meningkatkan kemandirian finansial pelaku usaha kecil dan menengah. Dengan membayar kembali pinjaman secara teratur, mereka membangun reputasi kredit yang baik dan meningkatkan akses mereka ke pembiayaan di masa depan, membantu mereka tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan.
4. Pendampingan dan Pemantauan, BRI unit Sukamerindu juga memberikan pendampingan dan pemantauan kepada nasabah dalam proses pengembalian kredit. Ini membantu nasabah dalam mengelola keuangan mereka dengan bijak dan memastikan bahwa mereka dapat memenuhi kewajiban pembayaran mereka secara tepat waktu.

Dengan demikian, pengembalian kredit di BRI unit Sukamerindu sesuai dengan tujuan program KUR dan membantu mencapai inklusi keuangan yang lebih besar serta pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di tingkat lokal.

2. Sumberdaya

Sumber daya yang paling penting dalam mengimplementasikan kebijakan adalah staf, anggaran dan sarana prasarana, tidak peduli seberapa jelas dan konsisten urutan implementasi dan tidak peduli akurat mereka dikirim, jika personel yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kekurangan sumber daya untuk melakukan pekerjaan yang efektif, kurangnya alokasi dana dan tidak didukung oleh kelengkapan sarana maka implementasi tersebut gagal dilaksanakan. Riant Nugroho (2012, h. 138) mengemukakan tujuan-tujuan dari dibentuknya kebijakan publik,

antara lain untuk menyerap sumberdaya, mendistribusikan sumber daya, mengatur, membebaskan, menggerakkan sumberdaya, mengerem dinamika yang terlalu cepat, memperkuat negara, maupun memperkuat pasar. Manusia adalah aktor pelaksana dari tercapainya kebijakan publik. Oleh karena itu, keterampilan dan kemampuan dari manusia sebagai implementator menentukan tercapainya tujuan yang ditetapkan dari sebuah kebijakan. Sebaliknya, kekurangan sumber daya yang terampil dan tidak berkualitas secara otomatis menjadi hambatan dan kendala dalam implementasi kebijakan. Anggaran sebagai sumber dana dalam pelaksanaan kebijakan, tanpa adanya ketercukupan anggaran dari instansi maka tidak dapat menjalankan kebijakan tersebut sesuai tujuan.

Kemudian sarana dan prasarana adalah pendukung dalam pelaksanaan program, kelengkapan dari sumber daya sarana menjadi penting dalam mencapai tujuan kebijakan. Dalam penelitian ini aspek sumber daya akan diidentifikasi dari sumber daya manusianya yaitu staf pelaksana program KUR yang diukur dari kecakapan dan kecukupan program KUR, kemudian dari anggaran dana program akan diidentifikasi sumber dana program KUR, terakhir yaitu kelengkapan sarana dan prasarana dari pelaksanaan program KUR ini.

1. Sumberdaya Manusia

Sumber daya manusia (SDM) memegang peran kunci dalam pelaksanaan program KUR di BRI. Dalam hal ini, keberhasilan program KUR tidak hanya tergantung pada sistem dan prosedur yang efisien, tetapi juga pada kualitas SDM yang terlibat dalam menjalankannya. Pegawai BRI memiliki peran utama dalam menyediakan pelayanan yang ramah dan informatif kepada calon nasabah, membantu mereka memahami persyaratan pinjaman serta memberikan panduan dalam proses pengajuan. Selain itu, SDM juga bertanggung jawab atas evaluasi dan verifikasi dokumen, memastikan bahwa pinjaman disalurkan dengan tepat kepada mereka yang memenuhi syarat. Selama masa pinjaman, SDM memberikan pendampingan dan pemantauan kepada nasabah, membantu mereka dalam pengelolaan keuangan dan strategi pengembangan usaha. Dengan keahlian dan pengalaman yang dimiliki, SDM BRI juga mampu mengelola risiko yang terkait dengan program KUR, serta memberikan kontribusi dalam inovasi dan peningkatan kinerja program. Oleh karena itu, keterlibatan SDM yang berkualitas sangat penting dalam memastikan keberhasilan dan dampak positif program KUR terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Sumber Daya Manusia (SDM) di BRI unit Sukamerindu telah terbukti memadai dalam penyaluran program Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Karyawan yang terlatih dan berkualitas di unit tersebut memainkan peran yang baik dalam setiap tahap pelaksanaan program KUR. Mereka tidak hanya memberikan pelayanan yang ramah dan informatif kepada calon nasabah, tetapi juga memberikan bimbingan yang komprehensif

selama proses pengajuan pinjaman. SDM BRI Sukamerindu juga telah menunjukkan keahlian yang tinggi dalam evaluasi dan verifikasi dokumen, memastikan bahwa pinjaman disalurkan dengan tepat kepada penerima yang memenuhi syarat. Selama masa pinjaman, tim SDM memberikan pendampingan yang intensif kepada nasabah, membantu mereka dalam pengelolaan keuangan, pengembangan usaha, serta memberikan solusi terhadap masalah yang mungkin timbul. Dengan demikian, keberadaan SDM yang memadai di BRI unit Sukamerindu tidak hanya memastikan kelancaran dan efisiensi dalam penyaluran program KUR, tetapi juga berperan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. Para pegawai BRI unit sukamerindu juga memiliki jenjang pendidikan rata-rata strata satu, dimana dengan latar belakang pendidikan yang baik ini membantu ketelitian para pegawai BRI unit Sukamerindu dalam menjalankan tugasnya menyalurkan program KUR. Pegawai BRI unit Sukamerindu juga di haruskan mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh kantor cabang, dan ada rapat bulanan setiap mantri yang berguna untuk menambah pengetahuan para mantri untuk menyalurkan program KUR. Dan para mantripun mendapatkan informasi terbaru terkait program KUR.

Sumber Daya Manusia di BRI unit Sukamerindu telah terbukti memadai dalam penyaluran program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Mereka memiliki kualifikasi pendidikan yang relevan dan telah menjalani pelatihan yang intensif dalam bidang keuangan dan perbankan. Keberadaan SDM yang berkualitas ini memungkinkan unit Sukamerindu untuk menyediakan pelayanan yang berkualitas tinggi kepada nasabah, mulai dari proses pengajuan hingga pendampingan selama masa pinjaman. Pegawai di unit tersebut memiliki ketelitian yang tinggi dalam melakukan evaluasi dan verifikasi dokumen. Mereka memastikan bahwa setiap pengajuan pinjaman dievaluasi dengan cermat untuk memastikan bahwa pinjaman disalurkan kepada penerima yang memenuhi syarat dan memiliki potensi untuk mengembangkan usaha mereka.

Selama masa pinjaman, SDM di BRI unit Sukamerindu memberikan pendampingan yang efektif kepada nasabah, membantu mereka dalam pengelolaan keuangan, strategi pengembangan usaha, serta memberikan solusi terhadap masalah yang mungkin timbul. Hal ini membantu memastikan kesuksesan dan keberlanjutan usaha para nasabah, yang pada gilirannya mendukung tujuan dari program KUR untuk meningkatkan inklusi keuangan dan pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal. Dengan demikian, keberadaan SDM yang memadai di BRI unit Sukamerindu tidak hanya memastikan kelancaran dalam penyaluran program KUR, tetapi juga memberikan manfaat yang signifikan bagi nasabah dan masyarakat secara keseluruhan, sesuai dengan tujuan dari program KUR itu sendiri.

2. Sumberdaya Finansial

Sumberdaya finansial sangat berpengaruh dalam penyaluran KUR di BRI karena menentu

menentukan kapasitas bank untuk memenuhi kebutuhan pinjaman dari pelaku usaha kecil dan mikro (UKM). Dengan alokasi dana yang memadai, BRI dapat menjangkau lebih banyak UKM yang membutuhkan akses keuangan untuk mengembangkan usaha mereka. Hal ini tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi mikro di berbagai wilayah, tetapi juga membantu mengurangi kesenjangan akses keuangan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Sumberdaya finansial yang cukup juga memungkinkan BRI untuk menjalankan proses penyaluran pinjaman KUR dengan lebih cepat dan efisien, mendukung UKM dalam memperluas usaha, meningkatkan produksi, dan menciptakan lapangan kerja baru.

Selain itu, dengan dukungan finansial yang memadai, BRI dapat mendorong inovasi dan kreativitas di kalangan UKM, memperkuat daya saing mereka dalam pasar yang semakin kompetitif. Oleh karena itu, pengelolaan sumberdaya finansial yang efektif menjadi kunci keberhasilan BRI dalam mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan usaha kecil dan mikro di Indonesia melalui program KUR. BRI unit Sukamerindu memiliki sumberdaya finansial yang baik dan memadai dalam penyaluran KUR, yang secara signifikan mendukung pemberdayaan pelaku usaha kecil dan mikro (UKM) di wilayah tersebut. Dengan alokasi dana yang mencukupi, unit ini mampu menjawab permintaan pinjaman UKM secara efektif, memfasilitasi pertumbuhan usaha kecil di lingkungan lokal. Sumberdaya finansial yang memadai memungkinkan BRI Sukamerindu untuk menyalurkan dana dengan tepat waktu dan efisien kepada para peminjam, memberikan mereka akses yang lebih mudah untuk memperluas usaha, meningkatkan produksi, dan menciptakan peluang kerja baru. Keberhasilan ini juga tercermin dalam kemampuan unit Sukamerindu untuk menjaga kualitas layanan dan mendukung inovasi di kalangan UKM, menjadikan mereka mitra yang kuat dalam membangun ekonomi lokal yang berkelanjutan dan inklusif.

BRI unit Sukamerindu tidak hanya memiliki alokasi dana yang mencukupi, tetapi juga dilengkapi dengan fasilitas yang lengkap untuk mendukung penyaluran KUR secara efektif. Fasilitas ini mencakup sistem administrasi yang terintegrasi dengan baik, proses verifikasi yang cepat, serta layanan konsultasi yang profesional bagi pelaku usaha kecil dan mikro (UKM). Dengan infrastruktur yang handal, unit Sukamerindu dapat memberikan layanan yang memadai dan responsif kepada para peminjam, memastikan bahwa dana KUR tersalurkan dengan transparan dan tepat waktu.

Selain itu, fasilitas lengkap ini juga mendukung UKM dalam mengelola dan mengoptimalkan penggunaan dana pinjaman untuk pengembangan usaha mereka, sehingga memberikan dampak positif yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi lokal dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sumberdaya finansial yang baik sangat sesuai dengan tujuan dari program KUR (Kredit Usaha Rakyat), karena mendukung pemberdayaan ekonomi mikro di tingkat lokal. Dengan sumberdaya finansial yang memadai, program KUR dapat memenuhi kebutuhan pinjaman dari pelaku usaha kecil dan mikro (UKM) yang seringkali kesulitan mendapatkan akses keuangan dari lembaga keuangan konvensional. Ini membantu mendukung pertumbuhan usaha kecil, meningkatkan produksi, menciptakan lapangan kerja baru, dan mengurangi kesenjangan ekonomi antarwilayah. Dengan memfasilitasi akses yang lebih mudah terhadap pinjaman, sumberdaya finansial yang baik juga mendorong UKM untuk berinovasi dan meningkatkan daya saing mereka dalam pasar yang kompetitif. Selain itu, dengan memanfaatkan dana secara efektif dan transparan, program KUR dapat berperan aktif dalam membangun ekonomi lokal yang berkelanjutan, memajukan kesejahteraan masyarakat, dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan ekonomi nasional secara inklusif.

E. KESIMPULAN

Implementasi program KUR di BRI Unit Sukamerindu diteliti dan dikaji berdasarkan salah satu aspek yang dikemukakan oleh Riant Nugroho (2018;774), dengan merujuk pada tujuan daripada program KUR berdasarkan hasil penelitian ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tahapan pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan program KUR di BRI unit Sukamerindu menunjukkan kesesuaian yang baik dengan tujuan program KUR. Dari awal hingga akhir proses, bank ini memberikan pendekatan yang terfokus pada penyuluhan dan informasi yang komprehensif kepada para calon nasabah. Penyampaian informasi pada tahap pengajuan pinjaman memastikan bahwa nasabah memahami secara jelas persyaratan, manfaat, dan risiko terkait dengan program KUR, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang tepat. Selain itu, BRI unit Sukamerindu tidak hanya menyediakan alokasi dana yang memadai, tetapi juga fasilitas yang lengkap seperti gedung yang representatif dan infrastruktur yang mendukung efisiensi layanan kepada nasabah. Melalui pendampingan dan pemantauan yang aktif setelah pencairan pinjaman, bank ini memberikan dukungan berkelanjutan kepada para pelaku usaha kecil dan menengah untuk mengelola dan mengembangkan usahanya secara efektif. Proses verifikasi dokumen yang cermat serta persetujuan pinjaman yang teliti juga menunjukkan komitmen BRI unit Sukamerindu dalam memastikan bahwa dana pinjaman disalurkan dengan tepat dan kepada penerima yang memenuhi syarat. Pengembalian kredit yang lancar dan tepat waktu juga mencerminkan keberhasilan dalam mencapai tujuan program KUR, seperti membangun ekosistem ekonomi lokal yang kuat dan meningkatkan kemandirian finansial para nasabah. Dengan demikian, BRI unit Sukamerindu tidak hanya memenuhi standar operasional dan kepatuhan, tetapi juga memberikan kontribusi positif dalam

mendukung pertumbuhan ekonomi lokal melalui akses yang lebih mudah terhadap pembiayaan bagi usaha kecil dan menengah di wilayahnya.

2. Sumberdaya

a. Sumberdaya manusia

Dalam kesimpulan, Sumber Daya Manusia (SDM) di BRI unit Sukamerindu memiliki peran yang sangat penting dalam keberhasilan dan keberlanjutan program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Mereka tidak hanya menyediakan pelayanan yang ramah dan informatif kepada calon nasabah, tetapi juga memberikan bimbingan yang komprehensif sepanjang proses pengajuan pinjaman. SDM ini terbukti memiliki kualifikasi pendidikan yang relevan dan telah melalui pelatihan intensif dalam bidang keuangan dan perbankan, yang meningkatkan kemampuan mereka dalam evaluasi dan verifikasi dokumen serta dalam memberikan pendampingan efektif selama masa pinjaman. Keterlibatan SDM yang berkualitas ini tidak hanya memastikan kelancaran penyaluran pinjaman kepada penerima yang memenuhi syarat, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. Dengan demikian, kontribusi mereka tidak hanya terbatas pada efisiensi operasional, tetapi juga pada pencapaian tujuan inklusi keuangan dan pengembangan usaha yang berkelanjutan, sesuai dengan visi dari program KUR.

b. Sumberdaya Finansial

Sumberdaya finansial yang memadai di BRI unit Sukamerindu telah membuktikan perannya yang penting dalam mendukung keberhasilan program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Dengan alokasi dana yang cukup, unit ini mampu menanggapi permintaan pinjaman dari pelaku usaha kecil dan mikro (UKM) dengan efektif, mempercepat proses penyaluran dana, dan memfasilitasi pertumbuhan usaha lokal. Sistem administrasi yang terintegrasi dengan baik serta proses verifikasi yang cepat merupakan contoh konkret dari komitmen unit Sukamerindu dalam memberikan layanan yang profesional kepada nasabah. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan akses UKM terhadap pembiayaan, tetapi juga mendorong inovasi dan peningkatan daya saing mereka di pasar yang semakin kompetitif. Dengan demikian, pengelolaan sumberdaya finansial yang efektif di unit Sukamerindu tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, tetapi juga berkontribusi positif terhadap inklusi keuangan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, sesuai dengan tujuan dari program KUR itu sendiri.

F. DAFTAR PUSTAKA

Achmad Suharyo & Siti Khomiyati. (2020). *Analisis Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Menanggulangi Kemiskinan di Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung* 6 (2), 1-12.

- Agustino, L. (2012). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta. In *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta (p. 141).
- Bungin, B. (2007). *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu social*. Jakarta: Kencana Prenama Media Group.
- Eko Purnomo, & M. O. (2021). *Implementasi Kebijakan Pembelajaran Program Paket C Selama Masa Pandemi Covid-19* (Studi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Harapan Bangsa 1 Kota Bandar Lampung). 7(3) 29-40.
- Gobel, M. (2017). *Implementasi Kebijakan Kredit Usaha Rakyat Di Bank Rakyat Indonesia Unit Bahu Manado*. *Jurnal Administrasi Publik UNSRAT*, 3(046).
- Hardiyanti, H., & Sudarmi, S. (2019). *Implementasi Program Kredit Usaha Rakyat Di Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang*. *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik*, 5(2), 209–226.
- Hukum, S. I., & Binbangkum, D. (2007). *Prosedur penyaluran kredit usaha rakyat*.
- Ibrahim. (2018). *metodologi penelitian kualitatif deskriptif*.
- Keban, Y. T. (2008). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori dan Isu*. Jakarta: Gava Media.
- Malano, H. (2011). *Selamatkan Pasar Tradisional*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Maria Ulfa, & Mohammad Mulyadi. (2020). *Analisis Dampak Kredit Usaha Rakyat pada Sektor Usaha Mikroterhadap Penanggulangan Kemiskinan di Kota Makassar*. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 11(1), 17–28. <https://doi.org/10.22212/aspirasi.v11i1.1294>
- Nugroho, R. 2009. (2009). *Public Policy*, Jakarta, PT. Elex Media Komputindo.
- Peronica, R. N. (2020). *Implementasi Kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Rakyat Indonesia Unit Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang*. <http://repository.uma.ac.id/handle/123456789/13089>
- Poerwadarminta, S. (1980). *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta, Gramedia.
- Pramono, J. (2020). *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. In *Kebijakan Publik*.
- Riant, N. (2017). (2017). *Public Policy, Dinamika Kebijakan Publik, Analisis Kebijakan Publik, Manajemen Politik, Etika Kebijakan Politik*. Jakarta: PT Elex Komputindo, Media.
- Riawan, R., & Kusnawan, W. (2018). *Pengaruh Modal Sendiri dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Terhadap Pendapatan Usaha (Studi Pada UMKM di Desa Platihan Kidul Kec. Siman)*. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 19(1), 31. <https://doi.org/10.29040/jap.v19i1.158>
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta,).
- Sugyono. (2008). *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung, Alfabeta.
- Sumaryadi, N. (2005). *Efektifitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*. Jakarta: Citra Utama.